



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Februari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
UNIT KERJA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ANDI AHMAD MAPPASILING**
2. Jabatan : **KETUA**
3. NHK : **631341**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 99.200.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 250 m2/96 m2 di KAB / KOTA KUTAI TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 99.200.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 100.000.000

1. MOBIL, CHEVROLET SPIN Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO 125CC Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ---

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 21.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 220.200.000

III. HUTANG Rp. 167.797.305

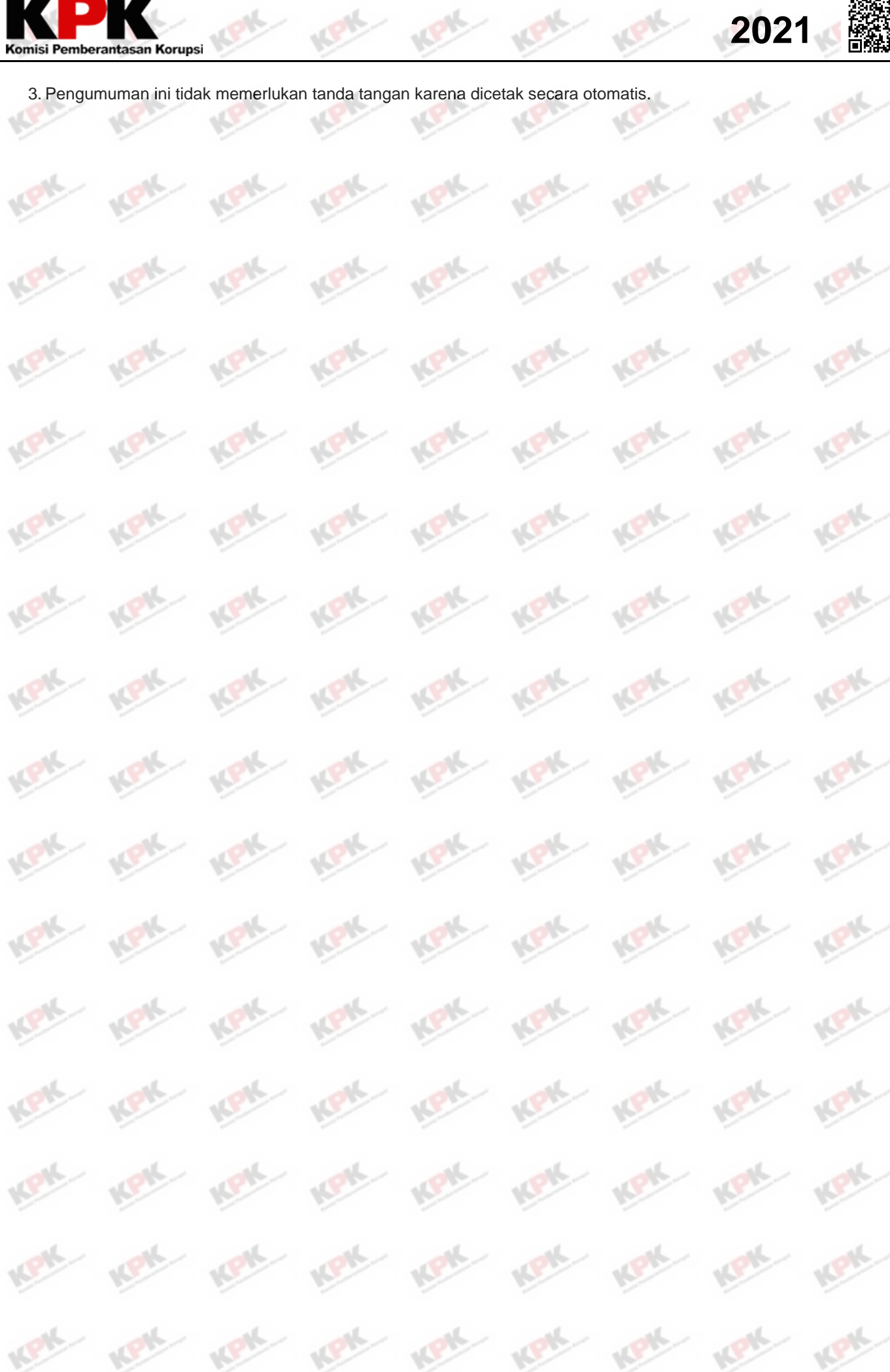
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 52.402.695

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.



3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.





PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Januari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
UNIT KERJA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ANDI YUSRI, S.S**
2. Jabatan : **ANGGOTA**
3. NHK : **523241**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 130.000.000

1. Tanah Seluas 360 m2 di KAB / KOTA KUTAI TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
2. Tanah Seluas 400 m2 di KAB / KOTA KUTAI TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 137.000.000

1. MOTOR, HONDA NC11BF1CB A/T Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
2. MOBIL, TOYOTA TOYOTA RUSH Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 50.350.000**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

Sub Total Rp. 317.350.000

III. HUTANG Rp. ----**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 317.350.000**Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-



Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Januari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
UNIT KERJA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **BUDI WIBOWO**
2. Jabatan : **ANGGOTA**
3. NHK : **618903**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. **600.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/70 m2 di KAB / KOTA KUTAI TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **120.000.000**

1. MOBIL, HONDA MOBILIO DD4 1.5 E MT CKD Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. **----**

D. SURAT BERHARGA Rp. **----**

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. **17.000.000**

F. HARTA LAINNYA Rp. **----**

Sub Total Rp. **737.000.000**

III. HUTANG Rp. **85.000.000**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. **652.000.000**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Februari 2022/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
UNIT KERJA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **BUNGA WARNA**
2. Jabatan : **BENDAHARA**
3. NHK : **840274**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. **150.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 80 m2/300 m2 di KAB / KOTA KUTAI TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **220.000.000**

1. MOBIL, DAIHATSU MINIBUS Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 220.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. **----**

D. SURAT BERHARGA Rp. **----**

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. **41.586.399**

F. HARTA LAINNYA Rp. **----**

Sub Total Rp. **411.586.399**

III. HUTANG Rp. **327.538.000**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. **84.048.399**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggai Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Januari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
UNIT KERJA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HERNILAWATI
2. Jabatan : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
3. NHK : 523324

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	----
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	129.000.000
1. MOBIL, TOYOTA NEW AVANZA/MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 129.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	3.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	132.000.000
III. HUTANG	Rp.	170.100.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	-38.100.000

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Januari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
UNIT KERJA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MUHAMMAD IDRIS, S.TP
2. Jabatan : ANGGOTA
3. NHK : 523240

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.214.000.000

1. Tanah Seluas 330 m2 di KAB / KOTA KUTAI TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 52.000.000
2. Tanah Seluas 500 m2 di KAB / KOTA KUTAI TIMUR, HIBAH TANPA AKTA Rp. 62.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 126 m2/112 m2 di KAB / KOTA WAJO, WARISAN Rp. 662.000.000
4. Tanah Seluas 52.896 m2 di KAB / KOTA WAJO, HASIL SENDIRI Rp. 63.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 500 m2/126 m2 di KAB / KOTA KUTAI TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 310.000.000
6. Tanah Seluas 250 m2 di KAB / KOTA KUTAI TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 65.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 16.000.000

1. MOTOR, SUZUKI UY 125 S AT Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
2. MOTOR, YAMAHA 1 PA Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 13.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 350.000**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

Sub Total Rp. 1.230.350.000



III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.230.350.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Januari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
UNIT KERJA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SITI AKHLIS MUAFIN
2. Jabatan : ANGGOTA
3. NHK : 622387

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 300.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 328 m²/126 m² di KAB / KOTA KUTAI TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 310.000.000

1. MOTOR, HONDA SPD-MTR/SOLO Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
2. MOBIL, EXPANDER EXPANDER SPORT Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ---

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 2.100.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 612.100.000

III. HUTANG Rp. 270.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 342.100.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.



3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.